



# **RENSTRA**

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-  
2029**

**DINAS PARIWISATA DAERAH  
KOTA TOMOHON**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI No 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan. Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan penjabaran visi dan misi Kota/kabupaten dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Dinas Pariwisata Kota Tomohon telah menyusun Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2025-2029 yang memuat visi, misi, keunggulan, peluang, kendala dan tantangan instansi pelaksana serta strategi Dinas Pariwisata dari tahun 2025 sampai dengan 2029 sebagai upaya memberikan informasi yang akuntabel dan terpercaya menyangkut program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan berpedoman pada Rancangan Renstra 2025-2029 ini, Dinas Pariwisata Kota Tomohon dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Harapan kami, Rancangan Renstra 2025-2029 ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Tomohon 2025  
Kepala Dinas Dinas Pariwisata Kota Tomohon

   
JUDHISTIRA A.K. SIWU, SE, M.Si  
NIP. 09780717 200312 1 009

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Pariwisata Kota Tomohon ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Tomohon tertuang dalam Keputusan Walikota Tomohon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata harus mendasarkan pada kebijakan Nasional, RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD, dan Renstra PD. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan Renstra PD untuk periode lima tahunan.

Renstra adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD tersebut berpedoman pada RPJMD dimana tercantum Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon terpilih, serta bersifat indikatif. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi periode tahun 2025-2029, Dinas Pariwisata Kota Tomohon harus menyusun Renstra PD periode tahun 2025-2029 yang direvisi dengan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029. Dokumen ini diharapkan dapat memberi arah dan strategi penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Dinas Pariwisata Kota Tomohon pada tahun 2025-2029. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Dinas Pariwisata Kota Tomohon merancang Renstra PD secara bersama-sama antara Kepala Dinas, Sekretaris, para Kepala Bidang serta seluruh Kepala Sub Bagian, JFT dan seluruh komponen organisasi yang terkait untuk mengimplementasikan seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Rencana Strategis, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 224 Nomor 194);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Instruksi Mentreri Dalam Negeri No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
  9. Peratura Wali Kota Tomohon nomor 25 tahun 2023, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2023 Nomor 25).
  10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2024 Nomor 4);
  11. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2025 Nomor 5).

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2025-2029 sebagai pedoman/dokumen perencanaan untuk periode 2025-2029 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepariwisataan Kota Tomohon bagi Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2025-2029. Program/kegiatan dalam Renstra merupakan implementasi dari RPJPD Kota Tomohon, RPJPD Kota Tomohon, RPJMD Kota Tomohon serta Perubahan RPJMD Kota Tomohon yang diselaraskan dengan peraturan perundangan dan kebijakan pusat maupun daerah lainnya untuk dilaksanakan seluruh stakeholder secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

#### **2. Tujuan**

- a. Menerjemahkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2025-2029, beserta program prioritas dengan berpedoman pada RPJPD (2025-2045) dan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
- c. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun;
- d. Merumuskan rancangan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Tomohon serta rencana penganggarannya untuk periode Tahun Anggaran 2025-2029;
- e. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya selama periode tahun 2025-2029.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Renstra ini terdiri dari 5 (lima) bagian utama, yakni meliputi:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
  - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
    - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
    - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
    - d. Mitra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon
- 2.2. Permasalahan dan Isu-isu strategi
  - a. Permasalahan
  - b. Isu-isu strategis

##### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

- 3.1. Tujuan Renstra
- 3.2. Sasaran Renstra
- 3.3. Strategi Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029

##### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, Indikator Kinerja Utama (IKU) , dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

##### **BAB V PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, Dinas Pariwisata Kota Tomohon mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Tomohon nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah.

Dinas Pariwisata Daerah dipimpin oleh kepala Dinas Pariwisata Daerah.

- (1) Kepala Dinas Pariwisata Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata Daerah membawahi:
  - a. sekretaris;
  - b. kepala bidang pengembangan destinasi pariwisata;
  - c. kepala bidang pemasaran pariwisata; dan
  - d. kepala bidang pengembangan kemitraan pariwisata.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi:
  - a. kepala subbagian umum, perencanaan, kepegawaian, dan hukum; dan
  - b. kelompok JF.
- (4) Kepala bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d membawahi:
  - a. kelompok JF; dan
  - b. pelaksana.

maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pariwisata
  - a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan mengendalikan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang pariwisata, berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan;
  - b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
    - i. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
    - ii. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
    - iii. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata, dan;
    - iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris

- a. Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kesekretariatan dinas, meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, serta mengkoordinir penyusunan program dan penyelenggaraan kegiatan bidang-bidang pada dinas.
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program kegiatan dinas dan kesekretariatan;
  - ii. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum kepegawaian, perlengkapan, hukum, perencanaan, keuangan, aset dan pelaporan;
  - iii. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada dinas;
  - iv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, laporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan dinas; dan
  - v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh :  
Sub Bagian Umum, Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum

3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
  - a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata yang berhubungan dengan obyek dan daya tarik wisata termasuk pembinaan pengelolaan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi:
    - i. Melakukan penyusunan pedoman dan perencanaan pengelolaan destinasi wisata alam, budaya dan buatan;
    - ii. Menyusun dan melaksanakan pengembangan infrastruktur dan ekosistem;
    - iii. Menyusun pedoman tata kelola destinasi;
    - iv. Melaksanakan bimbingan teknis, pengelolaan, pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan buatan;
    - v. Menyusun dan membuat laporan kegiatan yang dilakukan; dan
    - vi. Menyusun pedoman bimbingan pengembangan destinasi wisata
    - vii. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan analisis destinasi wisata alam, budaya dan buatan
    - viii. Melakukan pembinaan pelayanan perizinan pengelolaan objek wisata alam, budaya, dan buatan
    - ix. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan buatan
    - x. Melakukan pembinaan dan penertiban dalam rangka peningkatan infrastruktur dan ekosistem
    - xi. Melaksanakan monitoring dan pemeliharaan infrastruktur destinasi wisata
    - xii. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan
    - xiii. Menyusun pedoman teknis dan bimbingan tata kelola destinasi

- xiv. Melaksanakan bimbingan teknis tata kelola destinasi untuk pengembangan destinasi wisata
  - xv. Melakukan penertiban dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan destinasi
  - xvi. Membuat dan menyampaikan laporan periodik kegiatan
  - xvii. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pariwisata Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
4. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- a. Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pemasaran Pariwisata;
  - b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi:
    - i. Merumuskan pelaksanaan program pemasaran dengan melaksanakan promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
    - ii. Menyusun program dan rencana strategis pemasaran pariwisata secara sistematis dan berkelanjutan;
    - iii. Memantau dan mengevaluasi rencana dan program pemasaran dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi prospek pasar sesuai dengan produk yang tersedia;
    - iv. Melakukan pengawasan dalam pembuatan dan menyediakan bahan-bahan dalam promosi;
    - v. Membuat pedoman teknis yang berhubungan dan promosi pariwisata;
    - vi. Melakukan evaluasi dan kegiatan promosi;
    - vii. Melakukan pengumpulan dan analisa bahan-bahan promosi;
    - viii. Melakukan pendekatan pasar wisata melalui event-event pariwisata yang strategis dan sesuai produk yang ada;
    - ix. Melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif kepada pemangku kepentingan dalam menyusun rencana secara berkelanjutan
    - x. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala
    - xi. Menganalisis dan mengidentifikasi pasar wisata serta perumusan pengembangan promosi serta pendekatan pemangku kepentingan pasar wisata
    - xii. Melaksanakan dan merencanakan kegiatan promosi pariwisata baik dalam maupun luar negeri
    - xiii. Membuat rumusan evaluasi pelaksanaan promosi pariwisata
    - xiv. Mendistribusikan bahan promosi sesuai kebutuhan pasar
    - xv. Menyusun dan membuat laporan setiap kegiatan yang dilaksanakan
    - xvi. Menyiapkan dan menyusun rencana pembuatan bahan promosi sesuai produk dan atraksi berdasarkan potensi yang ada
    - xvii. Membuat rencana desain bahan promosi baik cetak maupun elektronik
    - xviii. Melaksanakan observasi langsung terhadap potensi objek yang akan dimasukkan ke dalam bahan promosi
    - xix. Mengumpulkan, mengolah serta menganalisis data dan informasi event pariwisata dalam rangka menyiapkan materi pariwisata
    - xx. Menyusun dan membuat laporan kegiatan yang dilakukan

- xxi. Menyiapkan dan menyusun rencana seksi kerja sama informasi publikasi pariwisata
- xxii. Melaksanakan urusan penyusunan program di bidang pemasaran serta informasi pariwisata
- xxiii. Melaksanakan kerja sama regional, nasional maupun internasional dalam pembinaan dan pengembangan promosi dan pemasaran kepariwisataan
- xxiv. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap hubungan kerja sama baik regional, nasional maupun internasional dalam pemasaran kepariwisataan
- xxv. Menyusun dan membuat laporan kegiatan yang dilakukan secara berkala
- xxvi. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas pariwisata daerah yang berkaitan dengan tugasnya.

5. Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- a. Bidang Pengembangan Kemitraan Pariwisata mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengembangan kemitraan pariwisata yang berhubungan dengan pengembangan industri pariwisata dan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif serta pengembangan SDM pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pengembangan Kemitraan Pariwisata mempunyai fungsi:
  - i. Menyusun pedoman teknis industri pariwisata yang bermitra dan berintergrasi untuk pengembangan kepariwisataan;
  - ii. Membuat analisa prospek industri pariwisata dan dinamika pertumbuhan serta dampaknya bagi masyarakat dan kepariwisataan;
  - iii. Merencanakan dan menyiapkan materi bimbingan teknis pembinaan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dan pengembangan SDM pariwisata dan pemberdayaan masyarakat;
  - iv. Melakukan monitoring dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan; dan
  - v. Menyiapkan dan menyusun rencana pengembangan industri pariwisata
  - vi. Menganalisis prospek pasar untuk pengembangan industri pariwisata yang kontemporee dan kompetitif
  - vii. Melaksanakan monitoring dan pelaporan industri pariwisata
  - viii. Menyiapkan materi bimbingan teknis pengembangan industri pariwisata
  - ix. Menyusun dan membuat laporan periodik setiap kegiatan yang dilaksanakan
  - x. Menyiapkan dan menyusun rencana pengembangan sumber daya pariwisata ekonomi kreatif
  - xi. Menyiapkan dan merumuskan program pengembangan sumber daya pariwisata yang terkonsep
  - xii. Merencanakan dan merumuskan program pengembangan sumber daya pariwisata yang terkonsep
  - xiii. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif
  - xiv. Melaksanakan bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif

- xv. Menyusun dan membuat laporan periodik setiap kegiatan yang dilaksanakan
- xvi. Menyiapkan dan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia pariwisata
- xvii. Melaksanakan bimbingan teknis untuk pembinaan sumber daya manusia pariwisata
- xviii. Membuat pelaporan periodik kegiatan yang dilaksanakan
- xix. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

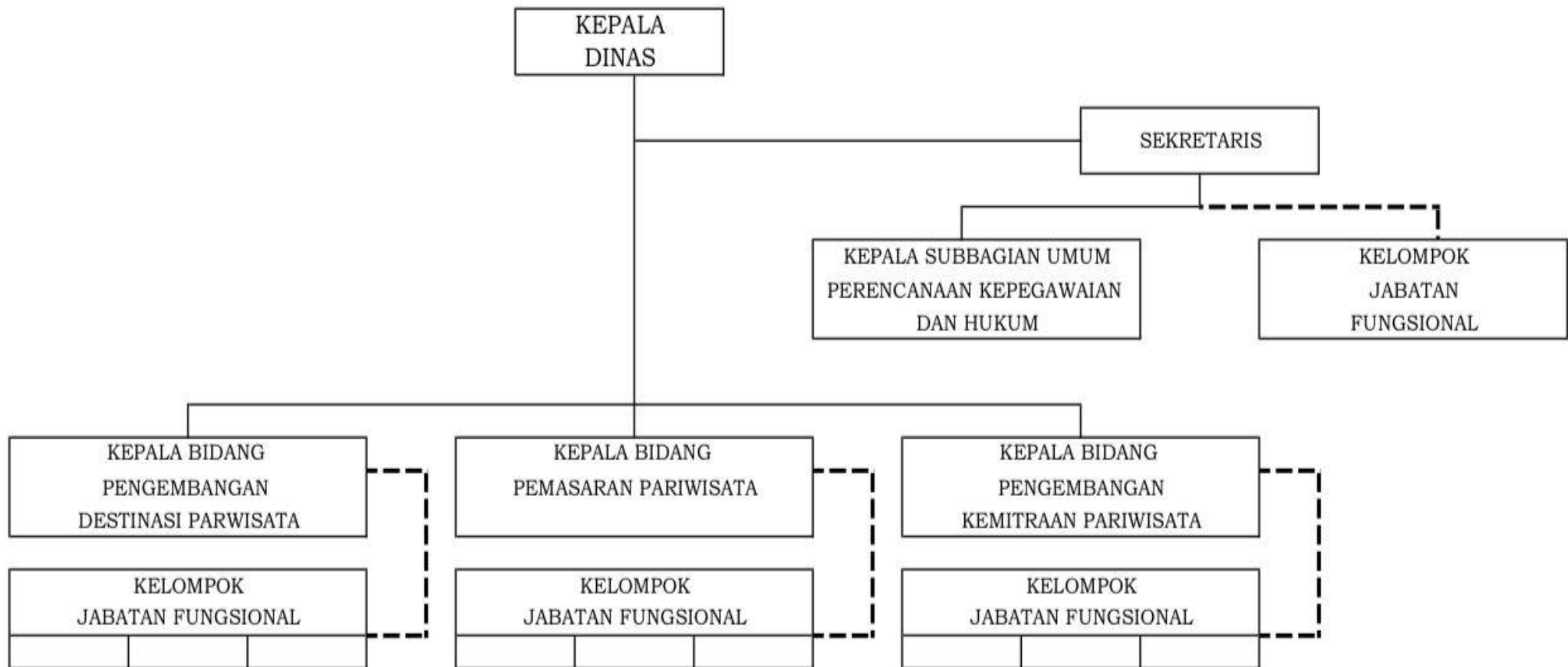
6. Kepala subbagian umum, perencanaan, kepegawaian, dan hukum mempunyai tugas dan fungsi:

- i. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pengoordinasian, penyusunan pengelolaan, dan pengendalian rencana dan program Dinas Pariwisata Daerah;
- ii. pengolahan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi perjalanan dinas, dan produk hukum Daerah;
- iii. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan data pegawai, mutasi, disiplin, pembinaan, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- iv. penyiapan perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan operasional, kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta perencanaan kebutuhan tenaga sesuai dengan kriteria dan klasifikasi pendidikan serta pengembangan;
- v. pelaksanaan pengumpulan data yang diperlukan untuk penyusunan program/kegiatan dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, serta mengoordinasikan data tersebut dengan bidang terkait;
- vi. pelaksanaan pengumpulan data, mengelola dan melaporkan baik sebagai bahan materi perencanaan keuangan maupun sebagai evaluasi hasil kegiatan;
- vii. pengadaan, inventarisasi pemeliharaan dan pelaporan perlengkapan dan aset kerumahtanggaan Dinas Pariwisata Daerah;
- viii. penyiapan bahan untuk pelaksanaan koordinasi pengumpulan pengelolaan data serta menyajikan data dalam bentuk data/pelaporan/profil untuk pengembangan dan evaluasi;
- ix. pelaksanaan pelayanan administrasi keuangan dan perlengkapan
- x. pengoordinasian pengelolaan anggaran keuangan dan perlengkapan;
- xi. pengoordinasian pengelolaan pengendalian dan pelayanan keuangan dan perlengkapan;
- xii. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup kegiatan perencanaan program, administrasi umum, dan kepegawaian;
- xiii. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

lingkup kegiatan perencanaan keuangan, aset dan pelaporan, dan produk hukum Daerah; dan

xiv. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang berkaitan dengan tugasnya.

SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PARIWISATA DAERAH  
KOTA TOMOHON



## b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan efisien. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon

Jumlah PNS yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2025 sebanyak 23 orang PNS, yang terdiri atas pejabat struktural sebanyak 5 orang dan pejabat fungsional tertentu sebanyak 9 orang, pelaksana sebanyak 8 orang dan PPPK sebanyak 1 orang.

Pejabat struktural meliputi:

1. Pejabat eselon II : 1 orang
2. Pejabat eselon III : 4 orang
3. Pejabat eselon IV : 1 orang
4. JFT : 8 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan formal, jumlah PNS yang ada di Dinas Pariwisata sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

### **Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan**

No	Jabatan	S3	S2	S1	D3	SLTA	Jumlah
1	Kepala Dinas		1				1
2	Sekretaris Dinas		1				1
3	Kepala Bidang			3			3
4	Kasubag		1				1

5	Kelompok Jabatan Fungsional (JF)			8			8
6	Pelaksana			7	1	1	9
							23

Kondisi Pegawai berdasarkan pangkat dan golongan:

1. Pembina Utama, IV/d : -
2. Pembina Utama Muda, IV/c : 1 orang
3. Pembina Tingkat I, IV/b : -
4. Pembina, IV/a : 3 orang
5. Penata Tingkat I, III/d : 7 orang
6. Penata, III/c : 3 orang
7. Penata Muda Tk. I, III/b : 6 orang
8. Penata Muda, III/a : 1 orang
9. Pengatur Tk. I, II/d : -
10. Pengatur, II/c : 1 orang
11. Pengatur Muda Tk.I, II/b : -
12. Pengatur Muda, II/a : -

### Aset, Sarana dan Prasarana

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah Kota Tomohon menempati kantor di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Tomohon Kelurahan Woloan Satu. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Disperkimda Kota Tomohon dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.3**

#### **Rekapitulasi Sarana Prasarana Disperkim Kota Tomohon sampai dengan Tahun 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA BARANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Gedung dan bangunan	5
2	Tanah	5
3	Kendaraan Roda Empat	3
4	Kendaraan Roda Dua	2
5	Kendaraan Roda Tiga	-
6	Gudang	1
7	Taman	1
8	PC	6
9	Laptop	8

10	Lemari	5
11	Kursi	21
12	Meja Rapat	11
13	Meja besi/metal	24
14	Genzet	1
15	TV	6
16	Printer	10
17	Scaner	3
18	Jaringan Internet	1
19	HandPhone	15
20	LCD	1
21	Droon	-
22	Kamera	-
23	Meja kerja kayu	3
24	CCTV	1
25	Mesin absensi	1
26	soundsystem	1
27	Dispenser	3

### c. Kinerja Pelayanan

#### Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Tomohon untuk masyarakat, secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang sudah tertera dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Tomohon (2025-2029), dan diharapkan realisasi kinerjanya dapat tercapai. Harapan ini dimungkinkan terealisasi, jikalau terwujud kondisi Kota Tomohon aman dan nyaman sehingga memungkinkan aktifitas *stakeholder* pariwisata maupun masyarakat Kota Tomohon berjalan baik dan lancar.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) :

**Tabel 2.4**

**Pencapaian kinerja pelayanan dinas pariwisata tahun 2021-2024**

Indikator Kinerja Utama	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Presentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan	0.9 %	3.8 %	2.23 %	4.06 %
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	0.24 %	0.09 %	0.16 %	0.48 %
Tingkat hunian akomodasi	12.74 %	7.08 %	16.41 %	20.6 %
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	84.506	95.546	2,01 %	2,05 %
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,773 %	10,604 %	11,491 %	12,7 %
Presentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	0,70 %	0,78 %	0,79 %	0,80 %
Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,2 hari	1,3 hari	1,4 hari	1,5 hari

Dalam realisasi tahun 2021 ada beberapa indikator yang belum tercapai dengan baik dikarenakan masa pandemi covid 19.

**d. Kelompok sasaran pelayanan**

Secara umum, kelompok sasaran Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon terbagi menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Masyarakat umum  
masyarakat umum ialah orang-orang yang berkunjung di destinasi wisata atau objek-objek wisata
2. Pelaku-pelaku Ekonomi kreatif

Pelaku Ekonomi kreatif adalah orang yang dikembangkan kompetensinya untuk meningkatkan kualitas ekonomi kreatifnya.

**e. Mitra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon**

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon memiliki mitra atau stakeholder dalam hal memberikan pelayanan, sebagai berikut:

- a. Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA)
- b. Indonesia Home Stay Association (IHSA)
- c. Generasi Pesona Indonesia (GENPI)
- d. Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
- e. Asosiasi Desa Wisata (ASIDEWI)
- f. Asosiasi Pondok Wisata Indonesia (APWISINDO)
- g. Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO)
- h. Asosiasi Dekorator (ASDEK)

**2.2. Permasalahan dan Isu-isu Strategi**

**1. Permasalahan**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon yang berkaitan dengan sektor Pariwisata dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

**a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.**

Permasalahan terkait SDM dan Sarana Prasarana Dinas Pariwisata Kota Tomohon yang dapat menghambat tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah:

- 1. Belum maksimalnya manajemen dan pemasaran pariwisata;
- 2. Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik Pemerintah;
- 3. Belum tersedianya perencanaan sectoral pariwisata;
- 4. Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada Kawasan terpadu pelaksanaan TIFF (Hanggar, Parade Route, Display Float dan Lokasi Pameran dalam satu Kawasan);
- 5. Kurangnya tenaga/SDM pariwisata yang mahir dan tersertifikasi (penutur asing, pemandu wisata dll);
- 6. Masih kurangnya atraksi-atraksi atau kegiatan penunjang pariwisata
- 7. Pengelolaan ICT (Information, Communication, Technology) Pariwisata yang belum maksimal.

**b. Permasalahan dari Aspek Daya Saing Daerah**

**Tabel 2.5**  
**Permasalahan dari Aspek Daya Saing**

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
---------------	--------------	--------------

Belum maksimalnya produktivitas daerah	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan kepariwisataa	Belum optimalnya manajem pariwisata
		Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata milik pemerintah
		Belum maksimalnya sarana prasarana pendukung event-event pariwisata berbasis kebudayaan dan kearifan lokal berskala nasional dan internasional, termasuk belum ada Kawasan terpadu pelaksanaan TIFF.

## 2. Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan dan potensi pariwisata yang ada. Berdasarkan kajian aspek-aspek tersebut maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Lombok Barat ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata. Berikut adalah struktur isu strategis di lingkungan urusan pariwisata Kota Tomohon

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan dan potensi pariwisata yang ada. Berdasarkan kajian aspek-aspek tersebut maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Kota Tomohon ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata. Berikut adalah struktur isu strategis di lingkungan urusan pariwisata Kota Tomohon.

1. Lingkungan Strategis Internal Untuk mewujudkan daerah tujuan wisata yang berdaya saing perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan potensi pariwisata dan budaya yang ada agar meningkatkan daya tarik wisata guna meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Untuk menentukan langkahlangkah strategis pelaksanaan pengembangan potensi pariwisata secara tepat, maka perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis internal sehingga diketahui faktor kekuatan dan faktor kelemahannya.

#### **A. Kekuatan (Strength)**

1. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi revitalisasi pengembangan destinasi wisata dengan mengedepankan keunikan dan keunggulan potensi masing-masing destinasi, termasuk pengembangan pariwisata pedesaan (desa-desa wisata) dengan aspek pemberdayaan masyarakat
2. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset seni budaya daerah dalam mendukung pengembangan Pariwisata
3. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi untuk meningkatkan peran berbagai media informasi untuk promosi dan penyebarluasan informasi budaya dan Pariwisata.
4. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarik dan pelayanan wisata.
5. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya perguruan tinggi dan akademi.
6. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah
7. Adanya dukungan landasan hukum sebagai landasan operasional baik berupa perundangundangan maupun peraturan daerah.
8. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi ketersediaan sarana kerja yang memadai untuk menunjang produktivitas kerja.
9. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi koordinasi stakeholder kepariwisataan khususnya dan stakeholder pembangunan umumnya.
10. Tersusunnya roadmap pengembangan pariwisata Kota Tomohon dalam bentuk RIPARDA.
11. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi jaringan internet untuk keperluan akses data dan informasi
12. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi untuk menjamin kondusifitas dalam pengembangan pariwisata strategis.
13. Adanya dukungan kebijakan dan fasilitasi fokus dan lokus sesuai dengan prioritas pembangunan untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan penguraian kepadatan aktivitas di wilayah Kota Tomohon.

#### **2. Kelemahan (Weakness)**

1. Ketersediaan anggaran yang terbatas, untuk meningkatkan daya saing objek/destinasi wisata yang layak dikunjungi
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor yang efektif dan implementatif.
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat, BUMD/BUMN, swasta (pelaku usaha), dunia pendidikan.
4. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

5. Belum optimalnya kualitas dan kapasitas layanan peningkatan peningkatan kompetensi pegawai dan sertifikasinya serta pelaku industri pariwisata/usaha jasa pariwisata dengan kebutuhannya.
  6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan potensi wisata.
  7. Belum optimalnya kinerja pariwisata berdampak pada rendahnya kesejahteraan dan perlindungan para pelaku (objek dan subjek) pariwisata, masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam bidang Pariwisata.
  8. Belum optimalnya penerapan teknologi dan informasi yang utuh dalam pengelolaan data dan informasi kepariwisataan. Terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap informasi layanan OPD khususnya terkait dengan data, informasi, dan permasalahan pariwisata di Kota Tomohon
  9. Belum optimalnya kinerja data dan informasi kepariwisataan yang komprehensif.
  10. Pemetaan destinasi belum dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek sarana dan prasarana, pengelola, aksesibilitas, atraksi, usaha pariwisata, pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata.
  11. Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kepariwisataan mengenai berbagai produk pariwisata, seperti industri pariwisata, potensi seni budaya, peninggalan-peninggalan nilai-nilai sejarah baik yang tangible maupun intangible, tata ruang pariwisata dan budaya serta pemberdayaan masyarakat
3. Lingkungan Lingkungan Strategis Eksternal Untuk mengantisipasi permasalahan dan ancaman dari luar yang menghambat pengembangan pariwisata perlu dilakukan identifikasi dan analisa terhadap lingkungan strategis eksternal sehingga dapat diketahui faktor-faktor ancaman dan peluangnya.

#### **A. Peluang (Opportunity)**

1. Meningkatnya kedatangan wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara yang membutuhkan sambutan yang baik, pelayanan yang cepat dan tepat waktu serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata.
2. Dinamisnya kemajuan dunia informasi dan teknologi menuntut sektor pariwisata untuk bisa lebih beradaptasi dan memanfaatkannya sehingga akan semakin memberikan informasi yang lebih masif dan luas.
3. Meningkatnya permintaan yang tinggi atas fasilitas daya dukung pariwisata yang memiliki kualitas dan kuantitas yang mampu menampung wisatawan
4. Meningkatnya serapan tenaga kerja/sumberdaya manusia yang memiliki berkompotensi lokal, regional, nasional, dan internasional dengan dukungan wawasan yang luas
5. Terasilitasnya penyediaan infrastruktur penunjang pariwisata sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona
6. Tersedianya sarana promosi pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event-event lokal, regional, nasional, dan internasional yang dapat menarik wisatawan.
7. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan kepariwisataan. Tersedianya potensi pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang berada di sekitar Kota Tomohon.
8. Peningkatan promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.

9. Meningkatnya investasi kepariwisataan melalui berbagai insentif, fasilitasi, dan kemudahan kemudahan, pelayanan dan perijinan
10. Tersedianya potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata di Kota Tomohon yang cukup besar, beragam dan unik.
11. Meningkatnya jumlah dan jangkauan perjalanan wisata setiap tahunnya.
12. Tersedianya dan berkembangnya utilitas yang memadai (seperti; fasilitas rumah sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll)
13. Tersedianya dan berkembangnya teknologi informasi untuk keperluan promosi dan publikasi.

## **B. Ancaman (Threat)**

1. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam dunia pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Globalisasi yang semakin bebas akan sangat mungkin menghilangkan jejak kebudayaan dan kearifan lokal apabila tidak adanya inovasi dan kreatifitas dalam pelestariannya.
3. Pesatnya perkembangan industri pariwisata di provinsi dan negara lain.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan
5. Tumbuhnya pedagang kaki lima (PKL), yang tidak tertata dengan baik dan dapat menimbulkan kesan kumuh
6. Terjadinya kesenjangan kualitas sumberdaya manusia dan pelaku usaha yang ada dengan yang dibutuhkan sesungguhnya
7. Terjadinya kesenjangan antara jumlah timbulan sampah yang ditimbulkan dengan sistem penanganan persampahan dan kebersihan lingkungan yang kurang memadai

Berdasarkan isu strategis yang terinventarisasi, maka dapat disusun strategi kebijakan menggunakan pendekatan SWOT, menjadi strategi 4 (empat) strategi utama yaitu sebagai berikut :

### **A. Strategi S-O (Strength-Opportunity)**

1. Menata/mengembangkan potensi wisata alam untuk meningkatkan daya tariknya.
2. Mengembangkan potensi seni dan budaya sebagai atraksi wisata seni/budaya dan obyek wisata budaya guna menunjang peningkatan daya tarik wisata.
3. Meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam menunjang kegiatan kepariwisataan terutama masyarakat di sekitar obyek wisata/kawasan wisata
4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata dan budaya dengan memanfaatkan berbagai media dan sarana promosi
5. Meningkatkan pelayanan terhadap tamu/wisatawan.
6. Mendorong usaha pariwisata yang berbasis komunitas
7. Mendorong pengembangan Desa Wisata.

### **B. Strategi W-O (Weakness-Opportunity)**

1. Menyusun dan mengoptimalkan/implementasi RIPARDA.
2. Melakukan pemetaan profil wisatawan yang berkunjung ke Kota Tomohon.
3. Meningkatkan koordinasi pembangunan pariwisata antar OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon, dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan pemerintah pusat
4. Mendorong ketersediaan pegawai Dinas Pariwisata yang memiliki kompetensi dalam bidang Pariwisata

### **C. Strategi S-T (Strength-Threat)**

1. Mendorong pengembangan infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas sehingga dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada wisatawan
2. Mendorong terciptanya masyarakat sadar wisata dan penerapan sapta pesona dalam kehidupan masyarakat
3. Melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan pariwisata (community based tourism)
4. Meningkatkan upaya dan kerja sama dengan biro-biro perjalanan lokal, regional, internasional dalam penyediaan paket-paket perjalanan wisata ke obyek dan daya tarik wisata dari dan ke Kota Tomohon.
5. Melakukan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia maupun usahausaha yang bergerak di bidang Pariwisata

#### **D. Strategi W-T (Weakness - Threat)**

1. Melakukan koordinasi dalam upaya penataan pedagang kaki lima (PKL).
2. Melakukan koordinasi dalam upaya penanganan kemacetan pada pelaksanaan event-event promosi dan event-event budaya.
3. Merencanakan dan mengusulkan anggaran program/kegiatan pengembangan pariwisata dan mengupayakan meningkatkan minat serta peran serta investor swasta.

Agar pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis, dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang. Isu strategis yang terkait dengan pariwisata diidentifikasi dari berbagai sumber.

#### **1. Isu strategis Global**

##### **Geopolitik dan Geoekonomi**

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinan terjadinya kembali konflik atau perang

di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indonesia-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antar negara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik.

Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank sentral di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global.

Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, penguatan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan *Baltic Dry Index level* menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022.

Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

## **2. Telaah RPJMN Tahun 2025-2029**

RPJMD memperhatikan dan mempedomani RPJMN yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN 2025-2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakn RPJPN 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden.

Visi RPJMN 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045, dengan misi:

Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Misi 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

- Misi 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- Misi 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- Misi 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Misi 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Misi 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- Misi 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Isu strategis pembangunan dalam RPJMN 2025-2029:

1. Rendahnya produktivitas.
2. Rendahnya kualitas SDM.
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat.
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif.
5. Krisis lingkungan.
6. Geopolitik dan geoekonomi.
7. Tata kelola dan Akuntabilitas Pemerintah.

### **3. Isu strategis Regional Sulawesi**

Isu strategis kewilayahan khususnya untuk wilayah Sulawesi:

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.
2. Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja diantaranya disebabkan karena mismatch antara tenaga kerja dan lapangan pekerjaan.
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan dimana struktur tenaga kerja masih didominasi pada sektor pertanian dan menyumbang angka kemiskinan.
4. Tingginya ketimpangan antar kelompok dan wilayah akibat belum meratanya infrastruktur antar daerah.
5. Masih rendahnya akses dan mutu bidang Pendidikan dan kesehatan karena sarana dan prasarana yang belum memadai.
6. Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana alam.

### **4. Isu strategis KLHS RPJMD**

Isu strategis KLHS RPJMD sebagai berikut:

1. Bencana Alam & Perubahan Iklim  
Isu Bencana Alam & Perubahan Iklim merupakan titik kumpul dari berbagai tekanan ekologis dan sosial yang berakar dari degradasi lingkungan dan ketidakseimbangan pembangunan. Faktor utama dari isu ini bersumber dari Isu Lingkungan Hidup, seperti meningkatnya konversi lahan, pengelolaan sampah yang buruk, serta pencemaran udara dan air, yang secara langsung menurunkan daya dukung lingkungan. Konversi lahan menyebabkan hilangnya daerah resapan

air dan memperparah risiko bencana seperti banjir dan kekeringan, sementara pencemaran mengganggu ekosistem alami dan kesehatan masyarakat. Ditambah lagi, cadangan air yang terus menurun memperparah tekanan terhadap lingkungan, khususnya di daerah rawan bencana. Dari sisi Isu Kebijakan Strategis, eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa kontrol dan tata kelola yang baik mempercepat laju kerusakan lingkungan. Tanpa regulasi yang ketat dan visi pembangunan yang berkelanjutan, SDA terus dieksploitasi tanpa mempertimbangkan daya pulih alam. Isu TPB memperburuk kondisi ini—kemiskinan dan kerentanan sosial membuat masyarakat sulit beradaptasi dan pulih dari dampak bencana, menciptakan siklus kerentanan yang berulang. Minimnya keterlibatan publik (isu konsultasi publik) dalam perencanaan ruang dan mitigasi bencana juga memperburuk dampak karena kebijakan yang dihasilkan tidak inklusif. Dengan demikian, isu bencana alam bukan semata akibat fenomena alam, tetapi akumulasi dari kerusakan lingkungan, kebijakan yang tidak adaptif, dan ketimpangan sosial yang memperlemah ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan kejadian ekstrem.

## 2. Ketimpangan Layanan Dasar & Infrastruktur

Ketimpangan layanan dasar dan infrastruktur merupakan dampak kumulatif dari perencanaan pembangunan yang tidak merata dan tidak berkeadilan. Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berperan besar di sini, terutama melalui indikator seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketika suatu wilayah memiliki akses terbatas terhadap layanan tersebut, maka masyarakat di dalamnya cenderung mengalami kualitas hidup yang lebih rendah, sulit berpartisipasi dalam ekonomi produktif, dan lebih rentan terhadap krisis. Masalah ini semakin diperparah oleh kemiskinan dan kerentanan masyarakat miskin, yang memunculkan ketimpangan horizontal antar wilayah maupun vertikal antar kelompok sosial. Isu Lingkungan Hidup juga turut berkontribusi secara tidak langsung: kerusakan lingkungan (banjir, kekeringan, pencemaran) seringkali menghancurkan infrastruktur dasar yang sudah terbatas, memperburuk ketimpangan. Selain itu, dari sisi Isu Kebijakan Strategis, pembangunan yang tidak berbasis pada pemerataan ruang dan kebutuhan riil masyarakat (seperti infrastruktur SDA yang hanya difokuskan pada pusat-pusat pertumbuhan) mengakibatkan ketimpangan struktural yang makin melebar. Ketika masyarakat tidak dilibatkan melalui proses konsultasi publik, aspirasi dan kebutuhan lokal terabaikan, sehingga pembangunan menjadi bias kepentingan elite. Maka, ketimpangan layanan dasar bukan hanya soal distribusi fisik infrastruktur, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola, aksesibilitas sosial, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya.

## 3. Ekonomi & Pariwisata Berkelanjutan

Isu Ekonomi & Pariwisata Berkelanjutan mencerminkan bagaimana sektor ekonomi dan pariwisata perlu tumbuh tanpa merusak lingkungan dan harus mampu memberdayakan masyarakat secara luas. Masalah muncul ketika kebijakan pembangunan tidak mengedepankan keberlanjutan. Isu Kebijakan Strategis berperan penting, khususnya terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan konversi lahan yang eksploitatif demi pembangunan ekonomi jangka pendek. Ketika SDA dieksploitasi berlebihan tanpa perlindungan, daya tarik pariwisata alam bisa rusak, dan ekonomi lokal yang bergantung pada sumber daya tersebut akan terancam. Isu TPB juga sangat terkait: rendahnya pendidikan dan kesehatan masyarakat membatasi kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam sektor pariwisata dan

ekonomi formal. Tingginya kemiskinan serta kerentanan masyarakat menyebabkan mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan, bukan pelaku yang aktif. Sementara itu, Isu Lingkungan Hidup memberikan tekanan tambahan: pencemaran, degradasi lahan, dan penurunan kualitas lingkungan akan menggerus potensi wisata berbasis alam, yang notabene menjadi andalan banyak daerah di Indonesia. Konsultasi publik yang lemah memperburuk situasi, karena masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam merancang arah pembangunan pariwisata sehingga konflik sosial dan ketimpangan ekonomi bisa terjadi. Dengan kata lain, ekonomi dan pariwisata yang tidak dikelola secara partisipatif, inklusif, dan berwawasan lingkungan akan gagal menopang pembangunan jangka panjang dan hanya menghasilkan pertumbuhan yang rapuh serta tidak merata.

## **5. Isu Strategis Kota Tomohon**

Berdasarkan telaah dari rumpun permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis global, nasional, provinsi, dan KLHS, maka dirumuskan isu strategis Kota Tomohon sebagai berikut:

1. Produktivitas, sistem ketahanan pangan, dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan.
2. Kualitas SDM yang produktif, berdaya saing, terlindungi, dan berkarakter.
3. Kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
4. Pemenuhan dan pemerataan layanan dasar dan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Identitas Kota Tomohon sebagai kota wisata dunia berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif serta penguatan sistem inovasi daerah.
7. Ketahanan sosial budaya dan ekologi serta ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim.
8. Adaptasi kemajuan teknologi digital dan pengembangan *smart city*

## **6. Isu Strategis Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon**

1. Meningkatkan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus
2. Sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota
3. Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri.
4. Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata
5. Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Tomohon
6. Peningkatan Partisipasi aktif Masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata

**Tabel 2.6**  
**ISU-ISU STRATEGIS DINAS PARIWISATA**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang relevan	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan			Isu strategis
			Global	Nasional	Regional	
Kota Tomohon menjadi salah satu dari tujuh Key Tourism Area (KTA) Manado-Likupang dengan 24 daerah tujuan wisata. Pelaksanaan TIFF sebagai event internasional	Belum optimalnya daya saing dan pengelolaan produktivitas	Ekonomi dan Pariwisata berkelanjutan	Rendahnya produktivitas Geopolitik dan Geoekonomi	Belum optimalnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja peningkatan kesejahteraan masyarakat	Rendahnya produktivitas, Inklusivitas dan keberlanjutan ekonomi	meningkatkan standar kualitas daya tarik destinasi wisata, jasa usaha pariwisata, SDM pariwisata sehingga memiliki standar kualitas prima untuk melayani wisman dan wisnus
						sinergisitas berbagai pemangku kepentingan pariwisata yaitu pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, media dan komunitas dalam pengembangan pariwisata Kota
						Jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam negeri dan luar negeri
						Pemanfaatan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata

						Dukungan dan fasilitasi para pelaku, penggiat, komunitas ekonomi kreatif untuk menjadi salah satu daya tarik dan keunikan pariwisata Kota Tomohon
						Peningkatan Partisipasi aktif Masyarakat lokal dalam perencanaan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata untuk memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang merata

### **BAB III**

#### **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

##### **3.1. Tujuan**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi

Visi Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025-2029, adalah:

**“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

"**TOMOHON MAJU**" berarti menjadikan Tomohon sebagai kota yang maju dalam kualitas SDM, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Tomohon.

"**BERDAYA SAING**" berarti meningkatkan kualitas SDM yang unggul serta kemampuan wilayah yang kompetitif sehingga berdaya saing tinggi.

"**SEJAHTERA**" berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Misi Pembangunan Kota Tomohon Tahun 2025-2029, adalah:

1. **Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius dan berbudaya;**
2. **Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan;**
3. **Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia;**
4. **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ;**
5. **Menjadikan pemerintah Kota Tomohon yang Berintegritas, Adaptif dan Responsif;**

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dengan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, terfokus pada misi ke tiga, yaitu:

**“Menjadikan Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia”**

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Sasaran Pokok RPJPD
<b>Misi 3 : Menjadikan Tomohon Kota Wisata Dunia</b>		
<b>Terwujudnya daerah tujuan pariwisata yang maju dan berkelanjutan</b>		
	<b>Meningkatnya produktivitas ekonomi dan daya saing ekonomi</b>	<b>Terwujudnya Kota Tomohon yang memiliki perlindungan adaptif terintegrasi</b>

Tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Tomohon sebagai perwujudan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yaitu: **“Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif”, yang diukur dari rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum.**

### 3.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat Daerah. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon dalam kurun waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat

memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan.

Dalam perumusan sasaran Rencana strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kota Tomohon selama lima tahun. Dan dengan perumusan sasaran strategis maka ada tujuan yang harus dicapai yaitu pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Terpilih, maka perumusan pernyataan sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon memberi dukungan dengan menyelaraskan sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam menunjang pencapaian sasaran dan program pemerintah daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029.

Adapun sasaran dinas pariwisata daerah Kota Tomohon

- **Meningkatnya kunjungan wisatawan**
- **Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah**

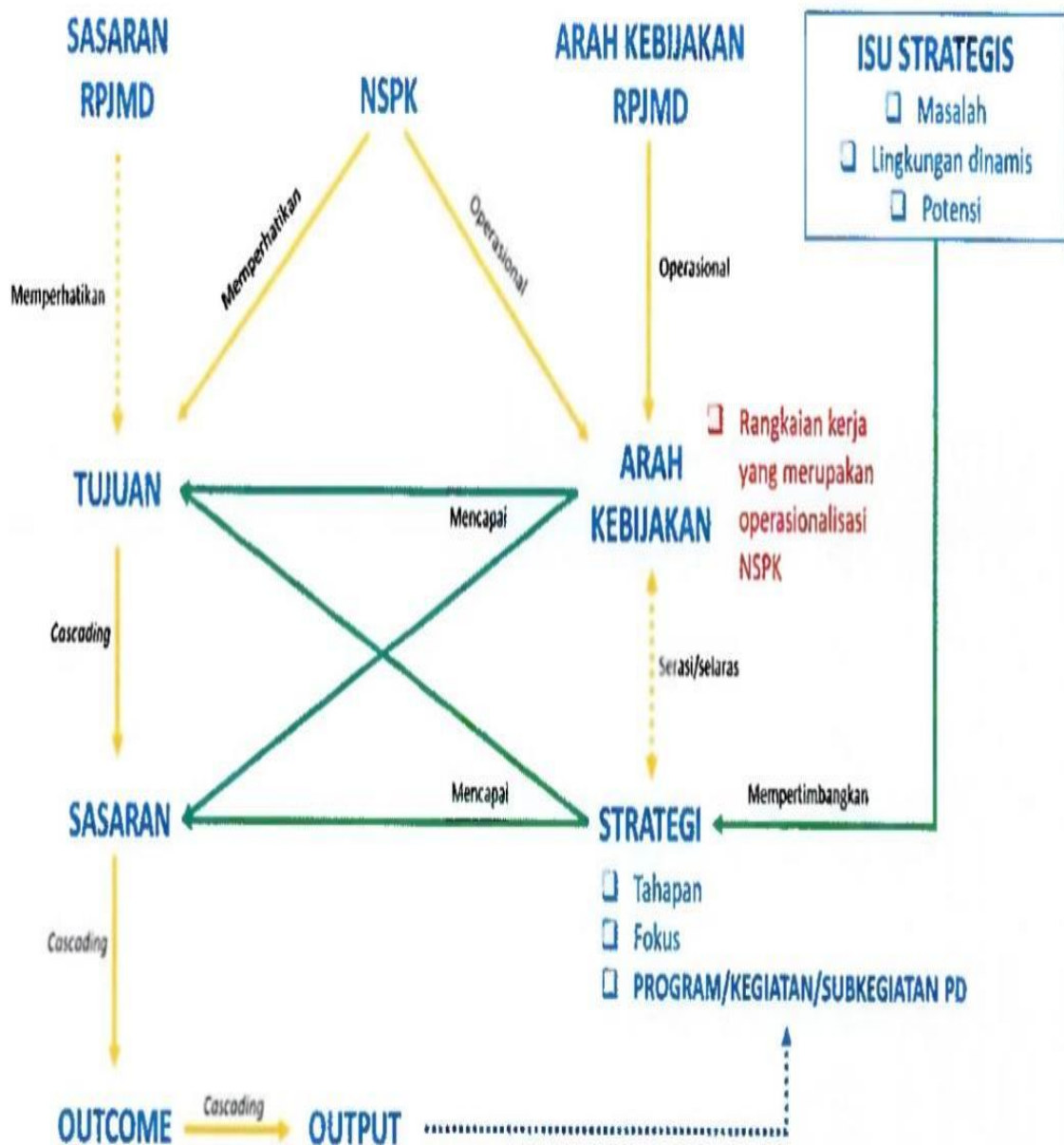
Diharapkan dengan adanya peningkatan daya tarik wisata akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan akan mempengaruhi daya beli konsumen pariwisata yang akan mampu mengerakkan industri pariwisata. Meningkatnya industri pariwisata ini tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah kunjungan tetapi juga ditopang oleh kebijakan-kebijakan pro pelaku usaha pariwisata oleh pemerintah daerah. Kebijakan – kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah para pelaku usaha wisata untuk kembali berusaha dan menjalankan aktifitas ekonomi mereka.

Adapun Indikator sasaran yang ingin dicapai adalah:

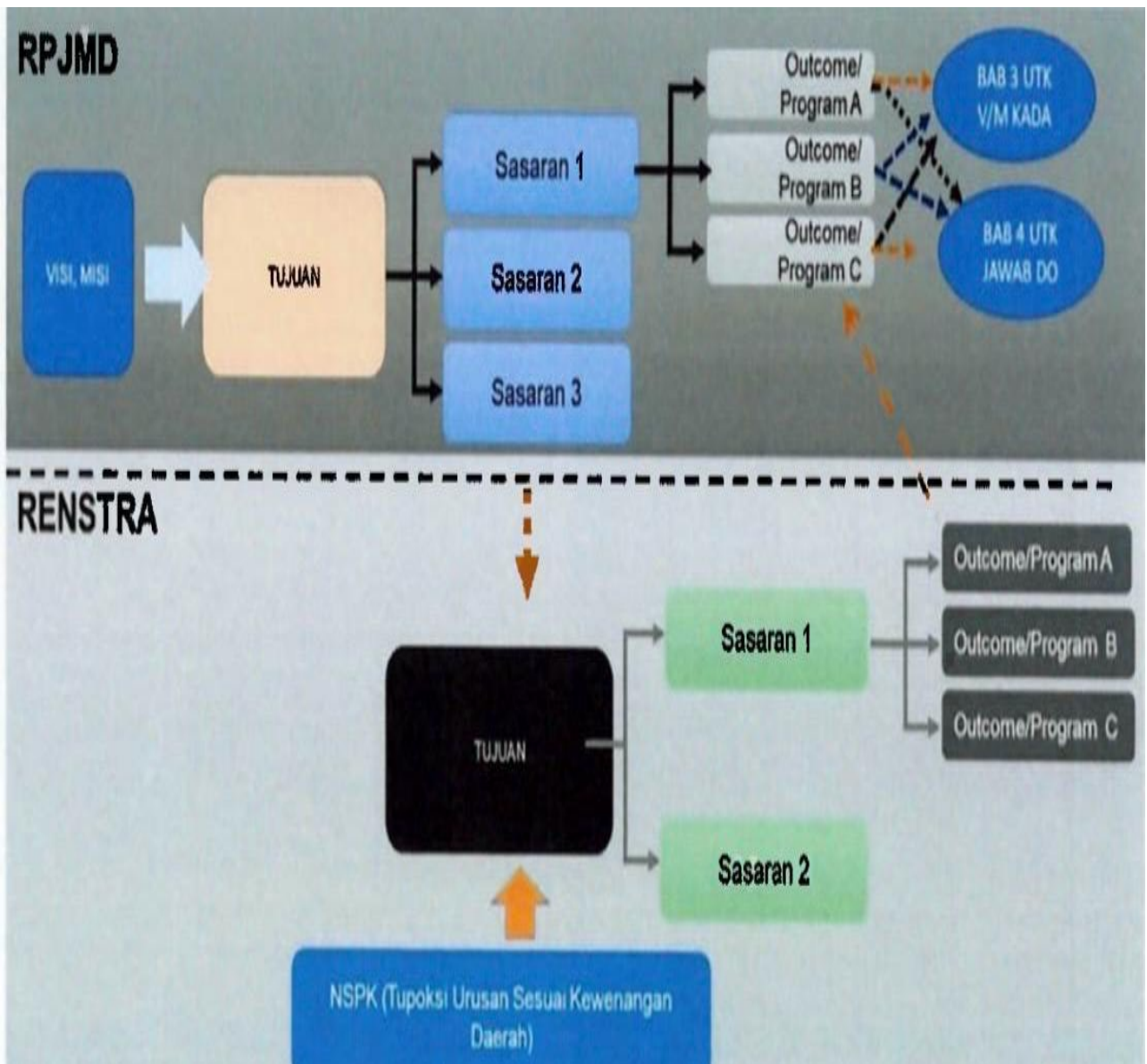
- **Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara**
- **Jumlah tenaga kerja pariwisata**

Dapat disimpulkan tingkat kunjungan wisata yang berasal dari perpindahan ini merupakan fenomena pariwisata yang dapat di maksimalkan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari produk pariwisata yang ditawarkan di destinasi wisata berupa barang dan jasa.

Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah



**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH</b>										
- Mewujudkan identitas Tomohon sebagai pariwisata maju dan berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,05	2,08	2,15	2,3	2,5	2,8	3
		Meningkatnya kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Orang)	504.006	506.000	509.000	521.000	534.000	559.000	589.000
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata (Orang)	2.139	2.150	2.160	2.170	2.180	2.190	2.200

**Tabel 3.4. Penahapan Renstra Dinas Pariwisata**

Uraian	Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap (2030)
--------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Peningkatan Fasilitas di objek-objek wisata yang dikelola pemerintah	3 objek	3 objek	3 objek	3 objek	3 objek
Promosi Pariwisata	3 event	3 event	3 event	3 event	3 event
Pengembangan kompetensi pelaku Ekraf	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang

### 3.3. Strategi Dinas Pariwisata

Strategi adalah bagian dari proses pencapaian tujuan dari suatu perencanaan. Strategi dipergunakan untuk mempermudah, mengefisienkan serta mengefektifkan pencapaian tujuan. Adapun Rencana Strategis merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata meliputi: perencanaan yang matang, pelaksanaan program yang efektif, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

#### a. Perencanaan yang Matang:

- Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang jelas dan terukur, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah.
- Mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang dalam sektor perhubungan di daerah.
- Menetapkan program dan kegiatan prioritas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi daerah.
- Menyusun rencana anggaran yang realistis dan sesuai dengan kemampuan daerah.

#### b. Pelaksanaan Program yang Efektif:

- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik antar seluruh unit kerja di Dinas Pariwisata.
- Memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.
- Melakukan pembinaan dan pelatihan kepada aparatur Dinas Pariwisata agar memiliki kompetensi yang memadai.
- Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan sarana pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, SDM pariwisata, pengembangan promosi, kemitraan pariwisata

- o Meningkatkan pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan pariwisata dan ekraf
- c. Evaluasi dan Monitoring yang Berkelanjutan:
- o Memantau secara berkala pelaksanaan program dan kegiatan.
  - o Melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul.
  - o Melakukan perbaikan dan penyesuaian program jika diperlukan.
  - o Membuat laporan evaluasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.
- d. Penguatan Koordinasi dan Kerjasama:
- o Membangun kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah daerah lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan lain-lain.
  - o Melibatkan masyarakat dan pihak swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
  - o Memperkuat hubungan dengan lembaga pendidikan dan penelitian untuk pengembangan inovasi di bidang perhubungan.
  - o Melakukan komunikasi yang efektif dengan media massa untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan perhubungan kepada masyarakat.

Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan Dinas Pariwisata dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah.

### 3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon menggambarkan spirit dan upaya yang dilakukan untuk mengubah kondisi saat ini menjadi kondisi yang diinginkan. Dalam formulasi strategi, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan organisasi dalam hal ini Kepala Dinas dan seluruh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Komitmen tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon.

Arah Kebijakan Dinas Pariwisata :

- Peningkatan Pengembangan destinasi di setiap kecamatan
- Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata
- Sosialisasi dan Evaluasi penerapan Standart Usaha Pariwisata
- Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

**Tabel 3.5**  
**Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pariwisata**

Operasionalisasi NSPK	Arah RPJMD	Kebijakan	Arah Kebijakan Renstra	Ket

Mewujudkan Tomohon kota Wisata Dunia yang berkualitas, profesional dan berkelanjutan serta mencegah penyimpangan dalam operasionalisasi industri pariwisata	Penguatan pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru menopang Tomohon sebagai Kota Wisata Dunia	Peningkatan Pengembangan destinasi di setiap kecamatan  Peningkatan pengembangan kerjasama pemasaran dan kemitraan pariwisata  Sosialisasi dan Evaluasi penerapan Standart Usaha Pariwisata  Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
---	---	--	--

## **BAB IV**

### **Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

#### **4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan. sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Dengan demikian. program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan daerah

Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon melaksanakan 1 (satu) urusan pilihan yaitu Urusan Pariwisata yang pelaksanaannya dijabarkan menjadi 5 (Lima) program 13 kegiatan dan 31 Subkegiatan yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
  - Kegiatan: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan :
    - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  - Kegiatan : Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab/Kota
  - Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
  - Sub Kegiatan :
    - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
- Pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota

2. Program Pemasaran

Kegiatan: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
- Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata

Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan :

- Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Sub Kegiatan :

- Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub kegiatan :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kegiatan : Administasi Umum Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat Menyurat;
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

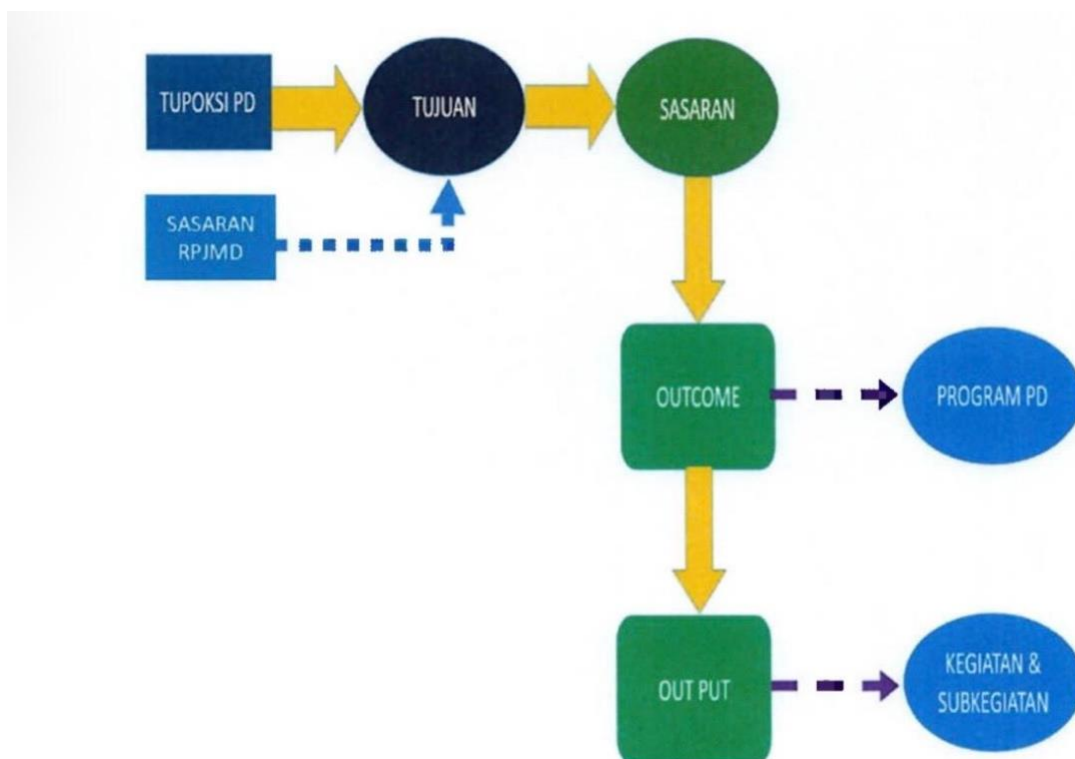
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Rencana Program dan Kegiatan di Dinas Pariwisata Kota Tomohon tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan RPJMD.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



**TABEL 4.2**  
**TEKNIK PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DINAS PARIWISATA**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>
Mewujudkan identitas Tomohon sebagai daerah pariwisata maju dan berkelanjutan	Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif					
		Meningkatnya kunjungan wisatawan			Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase pertumbuhan kunjungan wisata	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
				terlaksananya pengembangan DTW	Jumlah DTW yang dikembangkan	Pengelolaan daya tarik wisata kab/kota
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
				Terlaksananya pengolaan kawasan strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan strategis DTW yang dikelola	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata
				Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

				Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Neger	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
		Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah				
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				Tercapainya presentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
				Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektua
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
				Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

				Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata
				Tercapainya Presentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
				Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

a. Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan dan pendanaan

**TABEL 4.3**  
**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN**  
**DINAS PARIWISATA DAERAH KOTA TOMOHON**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				8.347.148.381,0 0		9.057.023.389,0 0		9.332.356.900,0 0		9.616.060.549,0 0		10.274.760.697,0 0		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.468.151.581,0 0		4.603.983.389,0 0		4.743.944.484,0 0		4.888.160.396,0 0		5.222.999.384,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	4.468.151.581,0 0	100	4.603.983.389,0 0	100	4.743.944.484,0 0	100	4.888.160.396,0 0	100	5.222.999.384,00	3.26.0.00.0.00.01.000 0 - DINAS PARIWISATA DAERAH	
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	28.944.000,00	100	29.283.389,00	100	34.741.531,00	100	45.500.000,00	100	58.000.000,00		
tersedianya dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	28.944.000,00	1	29.283.389,00	1	34.741.531,00	1	45.500.000,00	1	58.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
3.26.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.000.000,00		24.541.858,00		30.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	25.000.000,00	2	24.541.858,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	45.000.000,00		
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.509.500,00		2.600.000,00		2.600.000,00		3.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.509.500,00	1	2.600.000,00	1	2.600.000,00	1	3.000.000,00	1	7.000.000,00		



	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	27	25		25		25		25		25			
3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	27	25	25.000.000,00	25	35.000.000,00	25	35.000.000,00	25	40.000.000,00	25	45.000.000,00		
3.26.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.261.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	30.261.000,00	5	36.000.000,00	5	36.000.000,00	5	37.000.000,00	5	37.000.000,00		
3.26.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1.480.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	1.480.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	35.000.000,00	2	35.000.000,00		
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	315.000.000,00	100	364.700.000,00	100	416.000.000,00	100	431.000.000,00	100	570.000.000,00		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Tersedianya administrasi umum penunjang tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	315.000.000,00	1	364.700.000,00	1	416.000.000,00	1	431.000.000,00	1	570.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40.000.000,00		36.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	40.000.000,00	3	36.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	3	80.000.000,00		
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan				30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00		

3.26.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				3.600.000,00		3.700.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	3.600.000,00	12	3.700.000,00	12	6.000.000,00	12	6.000.000,00	12	10.000.000,00		
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00		
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				221.400.000,00		255.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	221.400.000,00	1	255.000.000,00	1	265.000.000,00	1	265.000.000,00	1	350.000.000,00		
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	982.894.331,00	100	632.000.000,00	100	652.000.000,00	100	637.000.000,00	100	713.000.000,00		
Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	982.894.331,00	1	632.000.000,00	1	652.000.000,00	1	637.000.000,00	1	713.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				40.169.700,00		46.000.000,00		56.000.000,00		48.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	40.169.700,00	1	46.000.000,00	1	56.000.000,00	1	48.000.000,00	1	60.000.000,00		
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				43.124.631,00		35.000.000,00		45.000.000,00		37.000.000,00		100.000.000,00		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELINE TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGET</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	43.124.631,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	37.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				899.600.000,00		551.000.000,00		551.000.000,00		552.000.000,00		553.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	899.600.000,00	12	551.000.000,00	12	551.000.000,00	12	552.000.000,00	12	553.000.000,00		
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	92.380.000,00	100	82.600.000,00	100	95.802.953,00	100	95.160.396,00	100	114.399.384,00		
Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	92.380.000,00	3	82.600.000,00	3	95.802.953,00	3	95.160.396,00	3	114.399.384,00		

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				83.860.000,00		74.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	83.860.000,00	2	74.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.26.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				8.520.000,00		8.600.000,00		10.802.953,00		10.160.396,00		14.399.384,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	8.520.000,00	3	8.600.000,00	3	10.802.953,00	3	10.160.396,00	3	14.399.384,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				1.290.000.000,0		1.500.000.000,0		1.545.600.000,0		1.592.586.240,0		1.701.678.397,00		
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	0,38	0,59	1.290.000.000,0	2,36	1.500.000.000,0	2,5	1.545.600.000,0	4,68	1.592.586.240,0	5,37	1.701.678.397,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH	
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,78	3,57		3,79		3,82		5,6		6,06			
	Tingkat hunian akomodasi (%)	20	20		21		21		22		22			
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	2,05	2,16		2,21		2,27		2,32		2,38			
	Kontribusi sektor parawisata terhadap PAD (%)	12,7	14,99		16,22		17,99		19,41		20,57			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		100	10.000.000,00	100	52.614.244,00	100	58.527.216,00	100	62.490.397,00	100	66.555.079,00		
Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	52.614.244,00	12	58.527.216,00	12	62.490.397,00	12	66.555.079,00		
3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				10.000.000,00		52.614.244,00		58.527.216,00		62.490.397,00		66.555.079,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	12	12	10.000.000,00	12	52.614.244,00	12	58.527.216,00	12	62.490.397,00	12	66.555.079,00		
<b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>	<b>BASELIN E TAHUN 2024</b>	<b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b>										<b>PERANGKAT DAERAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
			<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>		<b>2030</b>			
			<b>TARGE T</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGE T</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGE T</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGE T</b>	<b>PAGU</b>	<b>TARGE T</b>	<b>PAGU</b>		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100	175.000.000,00	100	175.000.000,00	100	180.000.000,00	100	180.000.000,00	100	190.000.000,00		
Tersedianya jumlah sarana dan prasarana tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan sasaran strategis pariwisata Kabupaten/Kot	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00		

3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				175.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		190.000.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	190.000.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100	1.105.000.000,00	100	1.272.385.756,00	100	1.307.072.784,00	100	1.350.095.843,00	100	1.445.123.318,00		
Tercapainya jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	12	12	1.105.000.000,00	12	1.272.385.756,00	12	1.307.072.784,00	12	1.350.095.843,00	12	1.445.123.318,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				315.000.000,00		315.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	12	12	315.000.000,00	12	315.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	325.000.000,00		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		620.095.843,00		700.000.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3	550.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	620.095.843,00	3	700.000.000,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				240.000.000,00		357.385.756,00		387.072.784,00		410.000.000,00		420.123.318,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	240.000.000,00	1	357.385.756,00	1	387.072.784,00	1	410.000.000,00	1	420.123.318,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.700.000.000,00		2.000.000.000,00		2.060.800.000,00		2.123.448.320,00		2.268.904.530,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	90	92	1.700.000.000,00	94	2.000.000.000,00	96	2.060.800.000,00	98	2.123.448.320,00	99	2.268.904.530,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100	1.700.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	2.060.800.000,00	100	2.123.448.320,00	100	2.268.904.530,00		
Terlaksananya promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya dan Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3	3	1.700.000.000,00	3	2.000.000.000,00	3	2.060.800.000,00	3	2.123.448.320,00	3	2.268.904.530,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	3		3		3		3		3			
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				1.665.000.000,00		1.965.000.000,00		2.025.800.000,00		2.088.448.320,00		2.233.904.530,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3	3	1.665.000.000,00	3	1.965.000.000,00	3	2.025.800.000,00	3	2.088.448.320,00	3	2.233.904.530,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00	3	35.000.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				100.000.000,00		103.040.000,00		106.172.416,00		109.400.057,00		116.893.961,00		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	10	20	100.000.000,00	30	103.040.000,00	40	106.172.416,00	50	109.400.057,00	60	116.893.961,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH	
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif		100	100.000.000,00	100	103.040.000,00	100	106.172.416,00	100	109.400.057,00	100	116.893.961,00		
Tercapainya presentase pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	103.040.000,00	1	106.172.416,00	1	109.400.057,00	1	116.893.961,00		
3.26.04.2.02.0014 - Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual				100.000.000,00		103.040.000,00		106.172.416,00		109.400.057,00		116.893.961,00		
Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual (Kegiatan)	1	1	100.000.000,00	1	103.040.000,00	1	106.172.416,00	1	109.400.057,00	1	116.893.961,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				788.996.800,00		850.000.000,00		875.840.000,00		902.465.536,00		964.284.425,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	10	20	788.996.800,00	30	850.000.000,00	40	875.840.000,00	50	902.465.536,00	60	964.284.425,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100	538.996.800,00	100	605.572.968,00	100	614.583.599,00	100	637.223.189,00	100	641.105.173,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	75	75	538.996.800,00	75	605.572.968,00	75	614.583.599,00	75	637.223.189,00	75	641.105.173,00		
	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	75	75		75		75		75		75			
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	40	40		40		40		40		40			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				125.000.000,00		221.000.000,00		222.000.000,00		223.000.000,00		224.000.000,00		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	40	40	125.000.000,00	40	221.000.000,00	40	222.000.000,00	40	223.000.000,00	40	224.000.000,00		
3.26.05.2.01.0008 - Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI				214.996.800,00		221.000.000,00		222.000.000,00		223.000.000,00		224.000.000,00		
Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI (Orang)	75	75	214.996.800,00	75	221.000.000,00	75	222.000.000,00	75	223.000.000,00	75	224.000.000,00		
3.26.05.2.01.0009 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				199.000.000,00		163.572.968,00		170.583.599,00		191.223.189,00		193.105.173,00		
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	75	75	199.000.000,00	75	163.572.968,00	75	170.583.599,00	75	191.223.189,00	75	193.105.173,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Cakupan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100	250.000.000,00	100	244.427.032,00	100	261.256.401,00	100	265.242.347,00	100	323.179.252,00		
Tercapainya Presentase pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	75	75	250.000.000,00	75	244.427.032,00	75	261.256.401,00	75	265.242.347,00	75	323.179.252,00		
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				250.000.000,00		244.427.032,00		261.256.401,00		265.242.347,00		323.179.252,00		
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	75	75	250.000.000,00	75	244.427.032,00	75	261.256.401,00	75	265.242.347,00	75	323.179.252,00		

**b. Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas**

**• Prioritas Pembangunan Nasional**

Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis SDA untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KETERANGAN</b>
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Mendukung Prioritas no 3

**• Prioritas Pembangunan Daerah**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas Pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas Pembangunan tahunan selama periode Pembangunan jangka menengah kota Tomohon meliputi :

1. Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
2. Peningkatan produktivitas pertanian dan sistem ketahanan pangan berkelanjutan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan pengelolaan Lingkungan hidup
4. Peningkatan Pariwisata yang Maju dan Berkelanjutan.
5. Peningkatan produktivitas, daya saing daerah, produk unggulan daerah, serta investasi.
6. Peningkatan dan pemerataan kualitas Pendidikan, kesehatan, daya saing tenaga kerja, dan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif.

7. Peningkatan pelayan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.
8. Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENSTRA PEMERINTAH KOTA TOMOHON**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH</b>				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan yang Maju dan Berkelanjutan
			3.26.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.02.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
2.	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Peningkatan Pariwisata dan Kebudayaan yang Maju dan Berkelanjutan
			3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	

#### 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Untuk mengetahui prestasi, kinerja, tingkat keberhasilan/kegagalan suatu program, kegiatan, institusi, unit kerja diperlukan Indikator Kinerja (IK). Wujud dari Indikator Kinerja (IK) adalah suatu uraian yang berisikan rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan beserta ukuran-ukuran/volume yang akan dicapai. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Indikator Kinerja ini akan mengindikasikan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan dalam perencanaan. Dengan demikian IK harus dibuat sebelum program dan kegiatan dilaksanakan. Penentuan target keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur. Pencapaian indikator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongrit dan dapat diukur. Indikator tersebut terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial yang selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tomohon ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh Dinas Pariwisata Daerah Kota Tomohon.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka indikator yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH								
2.	Presentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	0,78	0,86	3,57	3,79	3,82	5,60	6,06
3.	Peningkatan PAD sektor pariwisata (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan)	%	12,7	13	14,99	16,22	17,99	19,41	20,57
4.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,53	1,55	1,6	1,7	1,8	2

**Indikator Kinerja Daerah (IKD)** adalah alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator Kinerja Daerah (IKD) memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai dampak dari kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan

**Tabel 4.6**  
**INDIKATOR KINERJA DAERAH DINAS PARIWISATA**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
3.26.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA DAERAH									
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	4,06	0,86	3,57	3,79	3,82	5,6	6,06

2	Peningkatan PAD sektor pariwisata (Hotel/Penginapan, Restoran, Hiburan)	%	12,7	13	14,99	16,22	17,99	19,41	20,57
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,5	1,53	1,55	1,6	1,7	1,8	2
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	555.204	567.000	580.000	602.000	625.000	660.000	700.000
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,05	2,1	2,16	2,21	2,27	2,32	2,38

### 4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pariwisata

**Indikator Kinerja Kunci** menjadi dasar untuk penyusunan program kerja tahunan dan penganggaran. Setiap program dan kegiatan harus berkontribusi secara langsung pada pencapaian IKK yang sudah ditetapkan.

**Tabel 4.7**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS PARIWISATA**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
2.	Jumlah wisatawan mancanegara	positif	Orang	51.198	61.000	71.000	81.000	91.000	101.000	111.000
3.	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	positif	%	0,38	0,4	0,59	2,36	2,5	4,68	5,37
4.	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	positif	%	4,06	19,15	16,39	14,08	12,35	10,99	9,90
5.	Tingkat hunian akomodasi	positif	%	20,6	20	20	21	21	22	22

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2025-2029 merupakan suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari rencana strategis yang diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan yang tertera dalam RPJMD Kota Tomohon Tahun 2025-2029 serta berbagai peraturan maupun kebijakan Kementerian RI.

Dalam upaya untuk mencapai visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, maka Dinas Pariwisata Kota Tomohon menjabarkannya dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan terarah guna pengembangan sektor pariwisata Kota Tomohon dengan sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon.

Dengan memerhatikan hal-hal tersebut diatas, Renstra Dinas Pariwisata Kota Tomohon Tahun 2025-2029 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak terkait baik internal maupun eksternal (*stakeholder*). Semua dimaksudkan untuk pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Kota Tomohon yang semakin meningkat.

